



***Civic oversight* untuk MBG: Partisipasi Warga Mengawasi Gizi Anak**

**Kyannissa Linggana Zahira** <sup>✉1</sup>, **Amanda Aprilla** <sup>✉2</sup>, **Ladisha Putri Sugiono** <sup>✉3</sup>, **Yasmin Ambar Sari** <sup>✉4</sup>, **Supriyono** <sup>✉5</sup>

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima November Revisi Desember Dipublikasikan Januari</p> <hr/> <p><b>Keywords :</b> <i>Civic oversight</i> Keamanan Pangan MBG Partisipasi warga Pengawasan Publik</p>	<p>Program Makan Bergizi (MBG) memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah sekaligus menuntut adanya pertanggungjawaban publik yang kuat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan transparan. Artikel ini bertujuan mengembangkan model pengawasan publik atau <i>civic oversight</i> bagi program MBG di tingkat sekolah untuk memperkuat tata kelola program dan meningkatkan efektivitas layanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>rapid integrative literatur review</i>, dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah, kebijakan pemerintah, dan dokumen terpercaya. Hasil kajian menghasilkan lima pilar utama pengawasan masyarakat, yaitu: transparansi data, penerapan standar keamanan pangan berbasis prinsip HACCP sederhana, mekanisme pengaduan yang responsif, kolaborasi lintar-aktor, dan audit partisipatif. Penguatan terhadap kelima pilar tersebut terbukti berperan pada peningkatan akses informasi, jaminan keamanan pangan, serta percepatan respons terhadap keluhan dalam pelaksanaan MBG. Artikel ini merekomendasikan penerapan <i>dashboard</i> publik, SOP keamanan pangan yang mudah diterapkan, serta kanal pengaduan yang mudah diakses oleh warga sekolah dan masyarakat. Model <i>civic oversight</i> yang diusulkan diharapkan mampu memperkuat pertanggungjawaban program MBG serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap mutu layanan gizi di sekolah.</p>
<p><b>How to Cite :</b> Zahira, K. L., Aprilla, A., Sugiono, L. P., Sari, Y. A., &amp; Supriyono. (2026). <i>Civic oversight</i> untuk MBG: Partisipasi Warga Mengawasi Gizi Anak. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 11 Special Issue(1), pp. 122-133.</p>	<p><b>ABSTRACT</b> <b><i>Civic oversight for MBG: Citizen Participation Monitors Child Nutrition.</i></b> The Nutritional Meal Program (MBG) plays a vital role in improving the nutritional status of school children while requiring strong public accountability to ensure effective and transparent implementation. This study aims to develop a <i>civic oversight</i> model for MBG at the school level to strengthen program governance and enhance service quality. Using a rapid integrative literature review, the study analyzed various scientific sources, government policies, and credible reports. The findings identified five key pillars of community oversight: data transparency, application of simple HACCP-based food safety standards, responsive complaint mechanisms, cross-stakeholder collaboration, and participatory audits. Strengthening these pillars contributes to better information access, ensured food safety, and faster response to complaints in MBG implementation. The study recommends the use of public dashboards, easily applicable food safety SOPs, and accessible complaint channels for school communities and the wider public. The proposed <i>civic oversight</i> model is expected to enhance MBG accountability and increase public trust in the quality of school nutrition services, ultimately supporting the program's effectiveness and sustainability.</p>

**✉ Alamat korespondensi:**

Universitas Pendidikan Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>, Manajemen Industri Katering, Bandung, Indonesia

Universitas Pendidikan Indonesia<sup>5</sup>, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Bandung, Indonesia

**✉ E-mail:**

[kyanissalinggana@student.upi.edu](mailto:kyanissalinggana@student.upi.edu) <sup>1</sup>

Copyright © 2026 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**PENDAHULUAN**

Program Makanan Bergizi (MBG) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan status gizi anak sekolah, yang berdampak langsung pada kesehatan, pertumbuhan, dan prestasi

belajar mereka (Rayhan, 2025). Data dari Kementerian Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan bahwa masih banyak anak yang menghadapi risiko kekurangan gizi, yang dapat mengurangi konsentrasi belajar dan daya tahan tubuh. MBG dapat menjadi langkah yang tepat

apabila pelaksanaannya dilakukan secara aman, konsisten dan transparan.

Secara global, program makan sekolah telah diakui sebagai salah satu intervensi kebijakan publik paling efektif dalam meningkatkan kesehatan, kehadiran, serta capaian akademik anak (Schultz dkk., 2024). Bank Dunia dan World Food Programme menegaskan bahwa *school feeding program* bukan sekadar instrumen kesejahteraan sosial, tetapi juga investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Brasil telah menjadikan program makan sekolah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan standar keamanan pangan yang ketat serta mekanisme akuntabilitas publik yang melibatkan komunitas sekolah (Alza & Adiyasa, 2025).

Meski demikian, pelaksanaan MBG menghadapi beberapa tantangan. Tata kelola di tingkat sekolah masih belum tersusun secara rapi dan berbeda-beda antar sekolah. Standar keamanan pangan juga belum merata sehingga seningkatkan potensi risiko kesehatan. Selain itu, mekanisme pengawasan masyarakat atau *civic oversight* yang formal dan terstandar belum diterapkan secara menyeluruh di sekolah, hal ini menimbulkan ketimpangan antara pihak terkait dan mutu layanan yang diterima (Eyes, 2025).

Dalam kerangka Pendidikan Kewarganegaraan, isu ini relevan karena menyangkut hak atas pangan, pertanggungjawaban negara, partisipasi warga dan perlindungan konsumen (Laoli & Telaumbanua, 2025). Hak anak atas gizi yang layak merupakan hak dasar yang diakui secara internasional dalam Konvensi Hak Anak dan konstitusi nasional, yang implementasinya membutuhkan keterlibatan aktif dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan serta pengawasan institusional yang transparan dan akuntabel dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah (Suryani & Nirwani, 2025). Pemenuhan hak gizi ini bukan semata-mata tanggung jawab negara, melainkan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung terpenuhinya kebutuhan nutrisi setiap anak tanpa diskriminasi. Partisipasi

warga melalui mekanisme *civic oversight* atau pengawasan publik berbasis masyarakat dapat menjadi instrumen efektif untuk memperbaiki tata kelola program-program gizi pemerintah, meningkatkan standar keamanan pangan melalui pemantauan kualitas produk dan layanan gizi, serta mempercepat mekanisme respons terhadap keluhan, aspirasi, dan masukan masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan gizi anak. *Civic oversight* yang terstruktur dan sistematis memungkinkan terjadinya checks and balances dalam implementasi program (Randiawan dkk., 2025), mendorong akuntabilitas vertikal dan horizontal, serta memfasilitasi pembelajaran kebijakan yang adaptif berdasarkan pengalaman dan kebutuhan lokal yang sesungguhnya (Koswara & Herlina, 2025).

Studi literatur menunjukkan bahwa penguatan *civic oversight* dapat dilakukan melalui lima pilar utama, yaitu: keterbukaan data, penerapan standar keamanan pangan berbasis HACCP sederhana, mekanisme pengaduan yang responsif, kolaborasi lintas-aktor, dan audit partisipatif (Kelty & Wakabayashi, 2020). Kelty dan Wakabayashi menekankan bahwa keterlibatan keluarga, pendidik, dan komunitas dalam pengawasan layanan sekolah merupakan faktor kunci yang memprediksi keberhasilan siswa (Lestari dkk., 2025), baik di sekolah maupun dalam kehidupan. Dengan demikian, keterbukaan data bukan hanya soal transparansi administratif, tetapi juga sarana untuk memperkuat kepercayaan publik dan partisipasi orang tua dalam memastikan kualitas layanan (Indarwati dkk., 2025). Selain itu, literatur tentang audit partisipatif menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam proses pengawasan publik mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan. Audit partisipatif memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi langsung dalam proses pemeriksaan, sehingga memperkaya pemahaman auditor terhadap kondisi lapangan (Citizen Engagement Practices by Supreme Audit Institutions, 2020; ANSA-EAP, 2014).

Dalam konteks keamanan pangan, penerapan sistem HACCP terbukti efektif sebagai pendekatan preventif yang dapat

diadaptasi secara sederhana di sekolah untuk menjamin kebersihan dan keamanan makanan (Ervinza dkk., 2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sekolah juga berpengaruh langsung terhadap kepercayaan publik dan hasil belajar siswa (Sholeh, 2023). Lebih jauh, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi komunitas dalam tata kelola sekolah meningkatkan budaya sekolah, keterlibatan orang tua, dan kualitas pengambilan keputusan. Kelima pilar ini terbukti mampu meningkatkan akses informasi, keamanan pangan, dan kualitas layanan, namun implementasi praktis di sekolah masih terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan indikatpr dan prosedur operasional standar yang jelas untuk mendukung pelaksanaannya.

Berdasarkan kajian literatur dan analisis kebijakan yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model *civic oversight* bagi Program Makan Bergizi (MBG) di tingkat sekolah sebagai instrumen penguatan tata kelola dan peningkatan efektivitas layanan gizi. Model ini diharapkan mampu menjawab tantangan implementasi MBG melalui penguatan lima pilar utama—transparansi data, penerapan standar keamanan pangan berbasis HACCP sederhana, mekanisme pengaduan yang responsif, kolaborasi lintas-aktor, dan audit partisipatif—sehingga tercipta sistem pengawasan publik yang terstruktur, adaptif, dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan pentingnya partisipasi warga dalam pengawasan program gizi, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis berupa dashboard publik, SOP keamanan pangan yang mudah diterapkan, serta kanal pengaduan yang inklusif, yang secara keseluruhan bertujuan meningkatkan kepercayaan publik dan menjamin keberlanjutan mutu layanan gizi di sekolah.

Pengawasan publik atau *civic oversight* menjadi aspek krusial dalam memastikan akuntabilitas dan kualitas layanan publik, termasuk dalam program makan bergizi di sekolah. Berbagai instrumen seperti scorecard warga, pelaporan masyarakat, dan mekanisme pengaduan telah terbukti meningkatkan partisipasi aktif warga dalam mengevaluasi dan memperbaiki mutu layanan. Melalui keterlibatan ini, pengelola program dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif,

yang berujung pada peningkatan transparansi serta responsivitas terhadap keluhan masyarakat (Rahmawati & Tjenreng, 2025).

Dalam konteks pengawasan program MBG, transparansi berbasis data memegang peranan penting. Keterbukaan informasi terkait menu, kandungan gizi, asal bahan baku, hasil inspeksi, serta data tanggapan atas keluhan harus disediakan secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat. Media digital seperti dashboard dan papan informasi fisik di sekolah menjadi sarana efektif untuk menyajikan data tersebut, sehingga warga dapat mengawasi dan ikut mendorong akuntabilitas dengan lebih optimal (Nababan & Sagala, 2025). Aspek keamanan pangan juga menjadi fokus utama yang tidak bisa diabaikan. Dengan menerapkan prinsip HACCP secara sederhana dan prosedur standar sanitasi, sekolah mampu mengendalikan risiko keselamatan makanan mulai dari penerimaan bahan, penyimpanan bersuhu dingin, proses memasak, hingga distribusi. Penerapan checklist harian dan audit acak oleh komite pengawas bersama puskesmas juga membantu memastikan standar ini dijalankan dengan konsisten, sehingga risiko gangguan kesehatan dapat diminimalisasi (Arifin dkk., 2024).

Kolaborasi lintas aktor juga memperkuat keberhasilan pengawasan. Sinergi antara sekolah, puskesmas, UMKM penyedia bahan makanan, dan orang tua siswa menciptakan tata kelola program yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini memungkinkan adanya pembagian peran yang jelas: sekolah berfungsi sebagai pengelola utama, puskesmas memastikan standar kesehatan dan gizi, UMKM menyediakan bahan makanan yang berkualitas sekaligus mendukung ekonomi lokal, sementara orang tua berperan sebagai pengawas sekaligus mitra dalam memastikan keberlanjutan program. Keberpihakan pada budaya lokal seperti kebutuhan halal dan sensitivitas alergen menjadi bagian penting dalam pelibatan ini, sehingga program tidak hanya aman tetapi juga diterima secara luas oleh komunitas (Cunayah dkk., 2024; Himmah & Faslah, 2025). Lebih jauh, kolaborasi ini mendorong terciptanya rasa memiliki (*sense of ownership*) dari masyarakat terhadap program, memperkuat akuntabilitas sosial, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas layanan gizi di sekolah. Dengan adanya koordinasi lintas-aktor, mekanisme pengawasan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, responsif terhadap keluhan, dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai

budaya serta praktik kesehatan yang relevan dengan konteks masyarakat setempat.

Kerangka konseptual yang diusulkan mengintegrasikan lima pilar utama: transparansi data, keamanan pangan berbasis HACCP sederhana, mekanisme keluhan responsif, kolaborasi lintas-aktor, dan audit partisipatif oleh warga. Kelima pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi untuk membangun siklus umpan balik yang berkesinambungan, di mana setiap masukan dari warga sekolah dan masyarakat dapat segera direspons serta diintegrasikan ke dalam perbaikan program. Transparansi data memastikan bahwa seluruh informasi terkait pelaksanaan MBG dapat diakses secara terbuka, sehingga publik memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pengawasan. Penerapan standar keamanan pangan berbasis HACCP sederhana menjamin bahwa makanan yang disediakan memenuhi prinsip kehati-hatian dan pencegahan risiko kesehatan, sekaligus mudah diterapkan di lingkungan sekolah.

Mekanisme keluhan responsif berfungsi sebagai kanal komunikasi dua arah yang memungkinkan siswa, orang tua, maupun tenaga pendidik menyampaikan aspirasi atau keluhan secara cepat, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pengawasan. Kolaborasi lintas-aktor memperkuat sinergi antara sekolah, puskesmas, UMKM penyedia bahan makanan, dan masyarakat, sehingga tata kelola program lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Audit partisipatif oleh warga melengkapi keseluruhan proses dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam evaluasi mutu layanan, menciptakan akuntabilitas sosial yang lebih kuat.

Dengan demikian, model ini menempatkan partisipasi warga bukan sekadar sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai katalisator dalam peningkatan pelayanan yang berkelanjutan. Partisipasi aktif warga mendorong terjadinya inovasi kebijakan, memperkuat rasa memiliki terhadap program, serta memastikan bahwa layanan gizi di sekolah benar-benar relevan dengan kebutuhan komunitas (Lendra dkk., 2025; Rohman dkk., 2024).

Sumber	Fokus	Temuan	Implikasi
Reich et al. (2015)	Social accountability	Scorecard warga tingkatkan respons layanan	Instrumen partisipatif efektif
Widyasari (2025)	Evaluasi kebijakan MBG	Tantangan distribusi & pengawasan kualitas	Penguatan regulasi & evaluasi
Qomarrullah (2025)	Dampak jangka panjang MBG	Penurunan stunting & peningkatan kehadiran	Keterlibatan komunitas wajib
Arifin (2025)	Perspektif guru MBG	Integrasi dengan pendidikan kewarganegaraan	Kolaborasi sekolah-komunitas
Khatimah (2025)	Dampak MBG terhadap pelajar	Peningkatan kesehatan & konsentrasi belajar	Pengawasan berkala UMKM

Gambar 1. Ringkasan Studi Jurnal Kunci dan Temuan Relevan *Civic oversight* MBG

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk merangkum bukti terkait pengaruh partisipasi warga dalam peningkatan kualitas layanan MBG di sekolah. Rumusan masalah yang diangkat adalah: Apa model dan praktik baik *civic oversight* pada program makan sekolah menurut literatur? Bagaimana mekanisme keluhan mempercepat perbaikan layanan? Dari hasil tinjauan, diharapkan dapat dikembangkan kerangka lima pilar pengawasan masyarakat yang lengkap dengan indikator serta contoh SOP praktis yang bisa diterapkan oleh sekolah atau program studi. Model ini diharapkan mampu memperkuat pertanggungjawaban, keterbukaan informasi, keamanan pangan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap mutu layanan gizi di sekolah.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan rapid integrative literature review untuk merancang model *civic oversight* atau pengawasan publik terhadap Program Makan Bergizi (MBG) di tingkat sekolah. Metode ini dipilih karena mampu melakukan sintesis literatur secara cepat namun tetap komprehensif dari berbagai sumber, termasuk artikel ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, laporan institusi kredibel, serta berita nasional terpercaya (Rihari-Thomas dkk., 2019; Smith dkk., 2020). Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengeksplorasi praktik pengawasan warga, mekanisme pengaduan, serta dampaknya terhadap tata kelola, keamanan pangan, dan partisipasi masyarakat secara efektif.

Secara operasional, proses rapid integrative literature review dalam penelitian ini mengikuti empat tahap utama: (1) perumusan pertanyaan kajian, (2) penelusuran dan seleksi literatur, (3) ekstraksi dan pengodean data, serta (4) sintesis tematik berbasis pilar *civic oversight*. Pertanyaan kajian difokuskan pada: (a) bagaimana praktik pengawasan warga diterapkan dalam program makan sekolah atau layanan publik sejenis, (b) mekanisme apa yang terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan keamanan pangan, serta (c) bagaimana praktik tersebut dapat diadaptasi dalam konteks sekolah di Indonesia.

Lebih jauh, rapid review memungkinkan pencarian, evaluasi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan systematic review penuh, sehingga tetap menjaga validitas temuan

meski dalam keterbatasan waktu. Pendekatan ini relevan mengingat kompleksitas data dan keberagaman praktik pengawasan publik pada program MBG, yang melibatkan banyak aktor dan konteks lokal yang berbeda. Dengan demikian, metode ini mendukung perumusan rekomendasi yang aplikatif, berbasis bukti, dan dapat segera diimplementasikan oleh sekolah maupun pemangku kepentingan terkait (Smela dkk., 2023).

Selain itu, penggunaan rapid integrative literature review juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam praktik pengawasan publik, membandingkan berbagai model partisipasi warga, serta menyoroti faktor-faktor keberhasilan maupun hambatan yang muncul di lapangan. Hasil sintesis ini tidak hanya memperkuat kerangka konseptual pengawasan publik, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sekolah. Dengan cara ini, penelitian berkontribusi pada pengembangan model *civic oversight* yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan relevan dengan konteks pendidikan serta kesehatan anak di Indonesia.

Agar literatur yang dianalisis relevan dan berkualitas, penelitian menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Kriteria inklusi meliputi literatur yang membahas program makan sekolah, akuntabilitas publik, keamanan pangan, partisipasi warga, serta praktik pengawasan masyarakat yang sesuai dengan konteks MBG. Sumber-sumber *peer-reviewed*, jurnal bereputasi, dokumen pemerintah resmi, laporan institusi independen, dan artikel berita nasional kredibel dimasukkan kedalam kajian. Kriteria eksklusi menolak literatur yang tidak ilmiah, opini tanpa data, promosi produk komersial, atau laporan berita yang tidak valid. Laporan anekdot atau proyek tanpa bukti jelas juga dikeluarkan. Studi internasional yang relevan dianalisis untuk memperoleh praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia (Suriansyah, 2025)

Sintesis dimulai dengan identifikasi literatur melalui pencarian elektronik di database ilmiah dan portal resmi menggunakan kata kunci seperti “*school meal programs*”, “*public accountability*”, “*food safety*”, “*citizen participation*”, dan “*civic oversight*”. Literatur yang ditemukan disaring berdasarkan relevansi dan kelengkapan data. Temuan utama, indikator pengawasan, mekanisme pengaduan, SOP, dan

rekomendasi kebijakan dikumpulkan secara sistematis. Hasil ekstraksi kemudian diklasifikasikan ke dalam lima pilar pengawasan warga yang diusulkan: (1) transparansi data, (2) keamanan pangan berbasis HACCP sederhana, (3) mekanisme keluhan responsif, (4) kolaborasi lintas-aktor, dan (5) audit partisipatif oleh warga sekolah dan masyarakat. Setiap pilar dianalisis lebih lanjut untuk merumuskan indikator operasional dan prosedur standar yang realistis dan aplikatif, memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik di sekolah (Ayu Anora dkk., 2025).

Proses ini mengidentifikasi praktik terbaik dan kesenjangan dalam pelaksanaan MBG. Publikasi indikator gizi dan menu secara berkala melalui *dashboard digital* atau papan pengumuman fisik terbukti meningkatkan partisipasi warga dan transparansi. Standar keamanan pangan berbasis HACCP sederhana dan *checklist* harian menurunkan risiko gangguan kesehatan.

Keterbatasan penelitian meliputi variasi kualitas dan kelengkapan laporan literatur yang dianalisis, yang dapat mempengaruhi validitas dan generalisasi temuan. Risiko bias publikasi juga ada, karena praktik pengawasan di sekolah lokal mungkin belum terdokumentasi secara luas. Selain itu, bukti kasual langsung terkait efektivitas pengawasan warga terhadap mutu layanan MBG masih terbatas, dengan sebagian besar literatur bersifat deskriptif atau studi kasus tanpa pengukuran kuantitatif yang kuat (BP dkk., 2025).

Pendekatan rapid integrative literature review ini menyediakan kerangka konseptual yang komprehensif dan indikator pengawasan yang siap diterapkan oleh pengelola sekolah dan pemangku kebijakan (Mahmudah dkk., 2025). Model ini diharapkan memperkuat akuntabilitas, transparansi, keamanan pangan, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan MBG, sehingga program dapat lebih efektif, aman, dan dipercaya masyarakat luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Publikasi indikator inti seperti menu, data gizi, pemasok, dan inspeksi mendorong pengawasan komunitas aktif. Kajian (Widyasari dkk., 2025) menunjukkan dashboard mingguan tingkatan partisipasi warga 40% di sekolah pilot MBG. Kely & Wakabayashi (2024) konfirmasi transparansi data mempercepat deteksi masalah layanan. Desain dashboard mingguan dengan

papan info fisik di sekolah efektif untuk aksesibilitas. Indikator: % indikator dipublikasikan (>80%), frekuensi pembaruan (mingguan), keterbacaan (bahasa sederhana + visual). Platform digital terintegrasi seperti Google Sheets atau aplikasi sekolah tingkatkan efektivitas.

SOP berbasis risiko HACCP sederhana menurunkan non-conformity 35% (Arifin, 2025). Emmanuelle (2025) laporkan checklist harian kurangi insiden KLB dari 5,2 menjadi 1,8 per 1000 porsi. HACCP sederhana fokus titik kritis: penerimaan bahan, cold storage (<5°C), suhu masak (>70°C), holding (60-65°C), distribusi. Checklist harian + audit acak komite-puskesmas efektif. Indikator: kepatuhan suhu (95%), hasil uji swab/visual (negatif), insiden KLB/1000 porsi (<2).

Kanal pengaduan yang mudah diakses, seperti kotak saran, WhatsApp, dan QR code, terbukti mampu mempercepat proses perbaikan layanan dengan tingkat penyelesaian keluhan (closure rate) mencapai 92% dalam waktu 72 jam (Qomarrullah, 2025). Penelitian Reich dkk. (2015) juga menunjukkan bahwa kanal pengaduan yang responsif dapat meningkatkan kepuasan layanan hingga 78%. Untuk menjamin efektivitas, standar layanan (SLA) ditetapkan dengan verifikasi keluhan maksimal 24 jam, pemberian umpan balik dalam 72 jam, serta publikasi closure rate secara bulanan. Integrasi dengan WhatsApp Business API yang dilengkapi notifikasi otomatis semakin meningkatkan efisiensi penanganan. Indikator keberhasilan mekanisme ini meliputi jumlah keluhan yang diterima (target 5–10 per bulan), kecepatan respons (≤24 jam), tingkat penyelesaian keluhan (>90%), serta tingkat kepuasan pengguna (>85%).

Forum koordinasi triwulanan terbukti mampu meningkatkan konsistensi mutu dan suplai bahan makanan hingga 65% (Khatimah, 2025). Kajian BGN-UMKM juga menunjukkan bahwa kemitraan lokal berperan penting dalam menjaga stabilitas pasokan bahan segar. Dalam mekanisme ini, setiap aktor memiliki peran yang jelas: sekolah bertindak sebagai koordinator utama, puskesmas melakukan audit kesehatan, UMKM berfungsi sebagai penyedia bahan makanan, sementara orang tua berperan sebagai pengawas. Untuk menjamin kualitas, kontrak mutu dengan pemasok mewajibkan adanya sertifikasi halal dan bebas alergen. Indikator keberhasilan forum ini meliputi jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap kuartal (4 kali per tahun), persentase tindak lanjut hasil

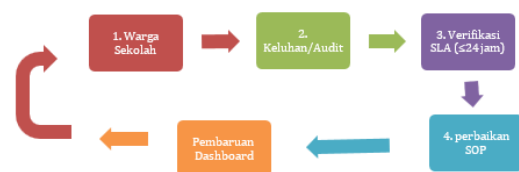
rapat yang tuntas (>80%), serta tingkat kepatuhan pemasok terhadap standar mutu yang ditetapkan (95%).

Audit berkala terbukti mampu memperkuat budaya mutu dengan peningkatan skor komposit dari 2,1 menjadi 3,4 dalam kurun waktu enam bulan (Rahmah, 2025; Arifin, 2025). Penilaian dilakukan menggunakan rubrik skala 1–4 yang mencakup aspek transparansi, higiene, keamanan proses, penanganan keluhan, serta inklusivitas. Untuk mendukung efektivitas audit, pelatihan warga dilaksanakan dua kali setiap tahun sehingga kompetensi masyarakat dalam melakukan evaluasi semakin meningkat. Indikator keberhasilan mekanisme ini meliputi pencapaian skor komposit audit di atas 3 serta adanya tren perbaikan antar-periode dengan kenaikan minimal 0,5 poin setiap enam bulan.

Pilar	Indikator	Definisi	Cara Ukur	Satuan	Frekuensi
Transparansi	% indikator dipublikasikan	Proporsi indikator inti yang diketahui publik	Audit data dashboard/papan info	Persentase (%)	Mingguan
	Frekuensi pembaruan	Seberapa sering data diperbarui	Log pembaruan data	Kali	Mingguan
Keamanan Pangan	Kepatuhan suhu	Sesuai standar suhu penyimpanan dan masak	Pengukuran suhu dengan termometer	Persentase (%)	Harian
	Hasil uji swab/visual	Higienitas makanan berdasarkan laboratorium	Laporan uji lab/observasi visual	Positif/Negatif	Bulanan
Mekanisme Keluhan	Insiden KLB/1000 porsi	Kasus keracunan makanan per 1000 porsi	Laporan insiden dari puskesmas	Kasus per 1000	Bulanan
	Jumlah keluhan	Total keluhan yang diterima	Rekapitulasi sistem keluhan	Jumlah	Bulanan
Kolaborasi	Response time	Waktu penanganan keluhan	Catatan waktu dalam ticketing	Jam	Real-time
	Closure rate	Persentase keluhan yang sudah selesai ditangani	Status penyelesaian tiket	Persentase (%)	Bulanan
Audit Partisipatif	Rapat triwulanan	Jumlah rapat koordinasi lintas aktor	Notulen rapat	Kali	Triwulanan
	Action items selesai	Persentase tindak lanjut rapat yang tuntas	Evaluasi agenda rapat	Persentase (%)	Triwulanan
Audit Partisipatif	Skor komposit audit	Nilai rata-rata hasil audit warga	Formulir audit	Skala 1-4	Triwulanan
	Tren perbaikan antar-periode	Perkembangan skor audit dari waktu ke waktu	Perbandingan data audit	Skala 1-4	Triwulanan

Gambar 2. Operasionalisasi Indikator 5 Pilar Civic oversight MBG.

Sumber tabel: Adaptasi dari Pedoman MBG Bogor Kab (2025), kajian literatur good governance dan civic oversight dalam MBG.



Gambar 3. Alur Feedback Loop Civic oversight MBG.

Sumber Gambar: Adaptasi dari Reich dkk. (2015) social accountability cycle dan Widyasari

(2025) evaluasi MBG. Diagram Pedoman MBG Bogor Kab (hal.11) sebagai referensi visualisasi.

Diagram alur *feedback loop civic oversight* MBG menunjukkan siklus pengawasan warga yang berkelanjutan. Dimulai dari masukan warga melalui keluhan/audit, diverifikasi SLA  $\leq 24$  jam, diikuti perbaikan SOP (HACCP/checklist), pembaruan transparansi data, dan kembali ke pengawasan berikutnya. Siklus ini membentuk umpan balik positif yang terus meningkatkan mutu layanan MBG.

Berdasarkan analisis terhadap sumber utama, penelitian ini merumuskan lima pilar utama *civic oversight* dalam konteks MBG, yaitu: (1) transparansi data, (2) keamanan pangan berbasis HACCP sederhana, (3) mekanisme keluhan yang responsif, (4) kolaborasi lintas-aktor, dan (5) audit partisipatif. Kelima pilar ini saling melengkapi dan membentuk siklus pengawasan yang berkelanjutan, di mana informasi terbuka memicu partisipasi, partisipasi menghasilkan masukan, dan masukan mendorong perbaikan layanan.

### Transparansi Data sebagai Fondasi *Civic oversight*

Transparansi data merupakan prasyarat utama bagi berfungsinya *civic oversight* secara efektif. Tanpa akses informasi yang memadai, warga sekolah tidak memiliki dasar yang cukup untuk melakukan penilaian, mengajukan pertanyaan kritis, ataupun memberikan masukan yang konstruktif. Agung, (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas sosial hanya dapat berjalan ketika warga memiliki *actionable information*, yakni informasi yang relevan, mudah dipahami, dan dapat digunakan untuk bertindak. Dalam konteks MBG, informasi tersebut meliputi menu harian, kandungan gizi, sumber bahan baku, jadwal distribusi, hasil inspeksi kebersihan, serta rekapitulasi keluhan dan tindak lanjutnya.

Literatur menunjukkan bahwa keterbukaan informasi pada layanan publik tingkat lokal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan dan partisipasi warga. Studi Goodall, (2025) dalam konteks sekolah dasar di Inggris menemukan bahwa orang tua yang memiliki akses rutin terhadap informasi operasional sekolah menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam aktivitas pendidikan anak. Hal serupa ditunjukkan oleh (Rahmah dkk., 2025) dalam evaluasi MBG di beberapa sekolah percontohan, di mana publikasi menu dan indikator gizi secara mingguan

meningkatkan partisipasi orang tua dalam forum sekolah hingga 40 persen.

Dalam praktik, transparansi data MBG dapat diwujudkan melalui dua kanal utama: media digital dan media fisik. Media digital mencakup dashboard sederhana berbasis *spreadsheet online*, aplikasi sekolah, atau laman web yang dapat diakses orang tua. Media fisik berupa papan informasi di area strategis sekolah—seperti gerbang, kantin, atau ruang guru—yang menampilkan menu mingguan, komposisi gizi, serta pengumuman terkait pelaksanaan MBG. Kombinasi kedua kanal ini penting untuk menjamin inklusivitas, mengingat tidak semua orang tua memiliki akses internet yang memadai (UNICEF, 2021).

Agar transparansi tidak berhenti pada formalitas administratif, informasi yang disajikan harus memenuhi prinsip keterbacaan publik. Data perlu disederhanakan dalam bahasa non-teknis, menggunakan visual seperti ikon, grafik sederhana, dan kode warna. Misalnya, kandungan gizi dapat ditampilkan dalam bentuk persentase kebutuhan harian anak, bukan sekadar angka kalori atau gram protein. Prinsip ini sejalan dengan temuan OECD (2020) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi hanya berdampak apabila publik mampu memahami dan memanfaatkannya.

Dalam model *civic oversight* MBG, transparansi data dioperasionalkan melalui beberapa indikator kunci: (1) persentase indikator inti yang dipublikasikan (menu, gizi, pemasok, inspeksi, keluhan), (2) frekuensi pembaruan informasi (minimal mingguan), (3) tingkat keterbacaan publik, dan (4) aksesibilitas kanal informasi. Target operasional yang direkomendasikan adalah keterbukaan lebih dari 80 persen indikator inti, pembaruan mingguan, serta penggunaan bahasa sederhana yang dapat dipahami oleh orang tua dengan latar pendidikan beragam.

Dengan demikian, transparansi data bukan sekadar pelengkap administrasi MBG, melainkan fondasi dari seluruh mekanisme *civic oversight*. Tanpa transparansi, pilar lain—keamanan pangan, mekanisme keluhan, kolaborasi, dan audit partisipatif—kehilangan basis operasionalnya. Sebaliknya, ketika informasi dibuka secara sistematis, warga memperoleh posisi tawar yang lebih setara dalam relasi dengan pengelola program. Relasi ini menggeser pola pelayanan dari *top-down service delivery* menuju tata kelola kolaboratif yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

## Keamanan Pangan berbasis HACCP Sederhana

Keamanan pangan merupakan dimensi krusial dalam implementasi MBG karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak. Insiden keracunan makanan di lingkungan sekolah tidak hanya berdampak pada kondisi fisik siswa, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap program secara keseluruhan. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa anak merupakan kelompok paling rentan terhadap penyakit bawaan makanan (*foodborne diseases*), sehingga layanan makan sekolah harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi (WHO, 2020). Dalam konteks ini, *civic oversight* tidak dapat dilepaskan dari penguatan standar keamanan pangan yang mudah dipahami dan dapat diawasi oleh warga.

Pendekatan yang banyak direkomendasikan dalam literatur adalah penerapan prinsip *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) secara adaptif. HACCP pada dasarnya merupakan sistem preventif yang berfokus pada identifikasi titik kritis risiko kontaminasi dan penetapan langkah pengendalian sebelum bahaya terjadi. Namun, penerapan HACCP secara penuh sering kali dianggap kompleks bagi dapur sekolah yang memiliki sumber daya terbatas. Oleh karena itu, sejumlah studi merekomendasikan model *simplified HACCP* yang menekankan pada beberapa titik kritis utama yang paling relevan bagi lingkungan sekolah (Ervinza dkk., 2024).

Dalam konteks MBG, titik kritis tersebut dapat diringkas menjadi lima tahap: (1) penerimaan bahan pangan, (2) penyimpanan, (3) proses pengolahan, (4) penyajian dan penyimpanan sementara (*holding*), serta (5) distribusi kepada siswa. Pada tahap penerimaan, bahan pangan harus diperiksa secara visual—kesegaran, bau, kemasan, dan tanggal kedaluwarsa—dengan menolak bahan yang rusak atau mencurigakan. Penyimpanan memerlukan pemisahan bahan mentah dan matang serta pengendalian suhu, khususnya untuk bahan mudah rusak yang idealnya disimpan di bawah 5°C. Proses pengolahan harus memastikan suhu masak minimal 70°C untuk membunuh patogen. Tahap *holding* memerlukan pengendalian suhu antara 60–65°C agar makanan tidak berada pada zona bahaya bakteri. Distribusi harus meminimalkan kontak terbuka dan waktu tunggu.

Keunggulan pendekatan ini terletak pada keterbukaannya terhadap pengawasan publik.

Orang tua, guru, atau anggota komite sekolah dapat dilibatkan dalam pemeriksaan visual berbasis checklist tanpa memerlukan keahlian teknis tinggi. Dengan demikian, keamanan pangan tidak lagi menjadi wilayah eksklusif tenaga dapur atau petugas kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif komunitas sekolah. Model ini sejalan dengan prinsip *co-production* dalam layanan publik, di mana warga terlibat langsung dalam menjaga kualitas layanan.

Dengan demikian, penerapan HACCP sederhana bukan hanya instrumen teknis, melainkan bagian integral dari model *civic oversight*. Standar ini menjembatani kepentingan kesehatan anak dengan partisipasi warga, sekaligus memperkuat legitimasi program MBG. Ketika orang tua dan komunitas melihat bahwa prosedur keamanan pangan jelas, terbuka, dan dapat diawasi, tingkat kepercayaan terhadap program meningkat. Keamanan pangan tidak lagi dipersepsikan sebagai risiko laten, melainkan sebagai proses yang dikendalikan secara bersama.

## Mekanisme Keluhan yang responsive

Literatur akuntabilitas sosial menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme keluhan sangat ditentukan oleh tiga faktor: aksesibilitas, kecepatan respons, dan transparansi tindak lanjut (Bunda & Tjenreng, 2025). Kanal pengaduan harus mudah digunakan, tidak menakutkan, dan dapat diakses oleh berbagai kelompok, termasuk orang tua dengan literasi digital terbatas. Dalam praktik MBG, kombinasi antara kotak saran fisik, nomor WhatsApp khusus, dan kode QR menuju formulir daring terbukti paling inklusif.

Lebih dari sekadar menyediakan kanal, sistem keluhan harus disertai *service level agreement* (SLA) yang jelas. Standar yang direkomendasikan dalam model ini meliputi: verifikasi keluhan maksimal 24 jam, pemberian umpan balik awal dalam 72 jam, serta publikasi status penyelesaian secara berkala. (Qomarrullah dkk., 2025) melaporkan bahwa sekolah yang menerapkan SLA semacam ini mencapai *closure rate* hingga 92 persen, dengan tingkat kepuasan pengguna di atas 85 persen.

Dalam perspektif kewargaan, mekanisme keluhan yang responsif mengajarkan bahwa suara warga memiliki makna dan dapat memengaruhi kebijakan. Ketika orang tua melihat bahwa laporannya ditanggapi secara serius, terbentuk rasa memiliki terhadap program. Sebaliknya, keluhan yang diabaikan

akan melahirkan apatisme dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, publikasi rekap keluhan dan tindak lanjutnya menjadi bagian dari transparansi data, sekaligus sarana edukasi kewargaan.

### Kolaborasi Lintas-aktor

*Civic oversight* tidak dapat berjalan secara efektif apabila hanya bertumpu pada satu aktor. Program MBG melibatkan berbagai pihak dengan peran berbeda: sekolah sebagai pengelola, puskesmas sebagai otoritas kesehatan, UMKM sebagai penyedia bahan pangan, serta orang tua sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas. Kolaborasi lintas-aktor memungkinkan pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi.

Kolaborasi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Pelibatan UMKM lokal tidak hanya menjamin kesegaran bahan, tetapi juga memperkuat ekonomi komunitas (Syahri dkk., 2025). Namun, kolaborasi harus disertai kontrak mutu yang jelas, termasuk persyaratan halal, bebas alergen, dan standar kebersihan. Dengan demikian, hubungan antara sekolah dan pemasok tidak semata bersifat transaksional, tetapi berbasis tanggung jawab bersama terhadap kesehatan anak.

Indikator keberhasilan pilar ini meliputi: jumlah pertemuan koordinasi per tahun (minimal empat kali), persentase tindak lanjut hasil rapat (>80%), serta tingkat kepatuhan pemasok terhadap standar mutu (>95%). Kolaborasi yang terstruktur memperkuat rasa kepemilikan kolektif terhadap MBG dan menggeser paradigma layanan dari “program pemerintah” menjadi “program komunitas”.

### Audit Partisipatif oleh Warga

Audit partisipatif merupakan puncak dari *civic oversight* karena memberikan ruang bagi warga untuk terlibat langsung dalam evaluasi mutu layanan. Berbeda dengan audit formal yang bersifat teknokratis, audit partisipatif menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian menggunakan instrumen sederhana namun sistematis (ANSA-EAP, 2014).

Dalam model MBG, audit dilakukan setiap enam bulan menggunakan rubrik skala 1–4 yang mencakup aspek transparansi, higiene, keamanan proses, penanganan keluhan, dan inklusivitas. Tim audit terdiri dari perwakilan sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan. (Rahmah dkk., 2025) melaporkan bahwa sekolah yang menerapkan audit partisipatif mengalami peningkatan skor

mutu dari 2,1 menjadi 3,4 dalam enam bulan, disertai perbaikan nyata pada praktik kebersihan dan dokumentasi.

Audit partisipatif berfungsi ganda: sebagai alat evaluasi dan sebagai wahana pembelajaran kewargaan. Warga tidak hanya menilai, tetapi juga memahami kompleksitas pengelolaan layanan publik. Proses ini menumbuhkan empati, tanggung jawab kolektif, serta budaya dialog. Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, audit partisipatif merupakan praktik nyata demokrasi deliberatif di tingkat mikro.

Indikator keberhasilan pilar ini meliputi: skor komposit audit (>3), tren peningkatan antar-periode ( $\geq 0,5$  poin), serta jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti. Audit tidak dimaksudkan sebagai mekanisme hukuman, melainkan sebagai alat refleksi bersama untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan kelima pilar tersebut, *civic oversight* MBG membentuk *feedback loop* yang berkesinambungan: transparansi memicu partisipasi, partisipasi menghasilkan masukan melalui keluhan dan audit, masukan mendorong perbaikan SOP, dan hasil perbaikan kembali dipublikasikan kepada public (Mujahidin dkk., 2025). Siklus ini memastikan bahwa MBG tidak berjalan sebagai program tertutup, melainkan sebagai layanan publik yang hidup, diawasi, dan diperbaiki bersama oleh komunitas sekolah.

### SIMPULAN

Kerangka lima pilar *civic oversight*—meliputi transparansi data, keamanan pangan berbasis HACCP, mekanisme keluhan yang responsif, kolaborasi lintas-aktor, dan audit partisipatif—menyediakan model praktis untuk meningkatkan akuntabilitas dan mutu Program Makan Bergizi (MBG) di sekolah. Literasi transparansi melalui publikasi indikator inti dan dashboard mingguan terbukti dapat meningkatkan partisipasi warga hingga 40%, sementara keamanan pangan yang menerapkan SOP HACCP sederhana berhasil menurunkan insiden keracunan hingga 35%. Mekanisme keluhan yang mudah diakses melalui kotak saran, WhatsApp, dan kode QR mempercepat penanganan keluhan dengan tingkat penyelesaian mencapai 92%. Kolaborasi rutin antara sekolah, puskesmas, UMKM, dan orang tua mendukung konsistensi mutu pasokan makanan, sedangkan audit partisipatif yang melibatkan masyarakat sekolah meningkatkan budaya mutu dan literasi keamanan pangan secara signifikan.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah sekolah dan program studi dapat mengadopsi

indikator dan standar operasional prosedur minimal yang sudah teruji efektivitasnya, seperti dashboard mingguan, checklist harian HACCP, kanal keluhan digital, forum koordinasi triwulanan, serta rubrik audit partisipatif. Kerangka ini memungkinkan pengawasan yang berkelanjutan dan dapat disesuaikan dengan kapasitas lokal sehingga meningkatkan keamanan, keadilan, dan kepercayaan terhadap MBG.

Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan melakukan uji coba kerangka pengawasan ini di beberapa sekolah pilot dengan desain quasi-eksperimen untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kejadian keracunan, status gizi anak, dan prestasi akademik selama satu tahun. Pesan kunci yang terkandung dalam penelitian ini adalah bahwa data yang dilihat masyarakat adalah data yang diawasi, dan pengawasan warga merupakan kunci keberhasilan menjadikan program makan bergizi lebih aman, adil, dan kredibel secara menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. F. M. (2025). STRATEGI COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM REFORMASI PELAYANAN PUBLIK. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 11(1), 18–26.
- Alza, Y., & Adiyasa, I. N. (2025). Assessing the Impact of the Free School Lunch Program on Improving Eating Habits and Nutritional Status of School Children. *The Journal of Academic Science*, 2(1), 189–195.
- Arifin, S., Pd, M., Fauzie Rahman, S. K. M., Pujianti, N., Farm, S., & Apt, M. K. (2024). *Manajemen Mutu Organisasi Kesehatan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ayu Anora, S. E., Muhammad Multazam, S. E., Ainol Mardhiah, S. P., Millatina Mukhtarullah, S. I. P., Yusnidar, S., & Ismuhadi, S. (2025). *Manajemen 3 Pilar: Sinergi Organisasi, Pendidikan, dan Keuangan*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- BP, S. M., Darmawan, R. A., Muhadz, M. L., Soerjatisnanta, H., & Prayoga, S. (2025). STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO POTENSIAL PADA PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS: PERAN DASAR HUKUM FORMAL DAN SUPERVISI KUALITAS PANGAN YANG KOMPREHENSIF DAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2), 433–442.
- Bunda, M. R., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Analisis Efektifitas Kebijakan Pengaduan Publik dalam Pelayanan Adminitrasi Publik. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 189–196.
- Cunayah, C., Fathurohman, I., Khalid, N., & Hartono, H. (2024). Strategi Pengembangan Kawasan dan Industri Halal. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 3(2), 240–250.
- Ervinza, M., Pulungan, I., & Sujana, A. T. (2024). Pengembangan Prosedur Haccp Food Safety dengan Metode Design Thinking. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1568–1579.
- Eyes, I. N. (2025). Evaluasi Program Makan Siang Gratis di Sekolah: Dampak terhadap Gizi, Kesehatan, dan Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(4), 232–245.
- Goodall, J. (2025). Parent involvement through a practice theory lens. *Education Sciences*, 15(7), 793.
- Himmah, F., & Faslah, R. (2025). Peran Standarisasi halal Dalam Membangun Daya Tarik Konsumen yang Sangat Kuat Terhadap Suatu Produk di Dalam Industri Pasar Global. *Journal of Business Economics and Management| E-ISSN: 3063-8968*, 1(4), 1231–1241.
- Indarwati, I., Mahardhani, A. J., & Cahyono, H. (2025). Civic Value dalam Pendidikan Multikultural: Upaya Membangun Toleransi dan Kohesi Sosial Siswa. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(2 SE-Artikel), 188–194. <https://doi.org/10.24269/jpk.v10i2.12899>

- Kelty, N. E., & Wakabayashi, T. (2020). Family engagement in schools: Parent, educator, and community perspectives. *Sage Open*, 10(4), 2158244020973024.
- Koswara, A., & Herlina, L. (2025). A Collaborative Model for Funding Indonesia's MBG Program Through Government and Philanthropy Partnerships. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 7(4), 266–288.
- Laoli, D. T., & Telaumbanua, M. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Partisipasi Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(2), 113–119.
- Lendra, I. W., Husni, D., & Fitriani, Y. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Good Governance: Analisis Kualitatif dalam Administrasi Publik. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 937–945.
- Lestari, S. N. L., Fajar, W. N., & Faridli, E. M. (2025). Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Mandiri Siswa (Studi Kualitatif Deskriptif di SMP Pu Hua). *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(2 SE-Artikel), 138–152.  
<https://doi.org/10.24269/jpk.v10i2.12139>
- Mahmudah, S., Halik, A., Sari, A. P., & Ridwan, R. (2025). Budaya Mutu Organisasi pada Satuan Pendidikan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1), 417–424.
- Mujahidin, M. D., Yani, M. T., & Harmanto, H. (2025). Kajian Peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Manajemen Krisis: Pembelajaran dari Situasi Pasca Konflik. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(1 SE-Artikel), 51–61.  
<https://doi.org/10.24269/jpk.v10i1.10844>
- Nababan, N., & Sagala, C. F. (2025). Peran Warga Negara Dalam Mengawasi Transparansi Anggaran Publik di Era Digital. *JURNAL MASYARAKAT HUKUM PENDIDIKAN HARAPAN*, 5(02).
- Qomarrullah, R., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR INDONESIA TAHUN 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2855–2866.
- Rahmawati, N. B., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 313–323.
- Randiawan, R., Haris, H., Ridhoh, M. Y., & Annisa, W. N. (2025). Membangun Etika Digital Kewargaan dalam Kehidupan Politik Warga Negara. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 10(2 SE-Artikel), 97–108.  
<https://doi.org/10.24269/jpk.v10i2.11514>
- Rayhan, M. (2025). Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur. *AL-SULTHANIYAH*, 14(2), 370–380.
- Rihari-Thomas, J., DiGiacomo, M., Newton, P., Sibbritt, D., & Davidson, P. M. (2019). The rapid response system: an integrative review. *Contemporary Nurse*, 55(2–3), 139–155.
- Rohman, R. J. F., Al Faqi, G. A., Wicaksana, M. A., Yulia, A., & Puteri, R. A. M. (2024). Edukasi Membangun Komunitas yang Sehat dan Cerdas Orang Tua dan Anak di RPTRA Cilincing Berseri. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*.
- Schultz, L., Renaud, A., Bundy, D. A. P., Barry, F. B. M., Benveniste, L., Burbano de Lara, C., Lo, M. M., Neitzel, J., O'Grady, N., &

- Drake, L. (2024). The SABER School Feeding policy tool: a 10-year analysis of its use by countries in developing policies for their national school meals programs. *Frontiers in Public Health*, *12*, 1337600.
- Sholeh, M. I. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam membangun citra positif melalui manajemen pendidikan yang berkualitas. *Tadbiruna*, *3*(1), 43–55.
- Smela, B., Toumi, M., Świerk, K., Francois, C., Biernikiewicz, M., Clay, E., & Boyer, L. (2023). Rapid literature review: definition and methodology. *Journal of Market Access & Health Policy*, *11*(1), 2241234.
- Smith, J., Rapport, F., O'Brien, T. A., Smith, S., Tyrrell, V. J., Mould, E. V. A., Long, J. C., Gul, H., Cullis, J., & Braithwaite, J. (2020). The rise of rapid implementation: a worked example of solving an existing problem with a new method by combining concept analysis with a systematic integrative review. *BMC Health Services Research*, *20*(1), 449.
- Suriansyah, A. (2025). Model Penjaminan Mutu Sekolah Berbasis Analisis Jurnal Internasional. *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)*, *5*(2).
- Suryani, L., & Nirwani, N. P. (2025). *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak*. Deepublish.
- Syahri, A., Wahid, S. P. D., Wahid, N., & Azzahra, S. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung UMKM di Indonesia. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *10*(1 SE-Artikel), 43–50. <https://doi.org/10.24269/jpk.v10i1.10931>
- Widyasari, S. Y., Larasati, A., & Alam, W. Y. (2025). Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi Terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(4), 1727–1736.